



KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Harry Irawan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jalan IAIN No. 1 Sutomo Ujung, Medan
harrirawan86@gmail.com

M. Shabri Abd. Majid

Universitas Syiah Kuala
Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh
mshabri@unsyah.ac.id

Isnaini Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jalan IAIN No. 1 Sutomo Ujung, Medan
isnaini.harahap@uinsu.ac.id

Abstrak

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari sifat, fungsi, dan pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi suatu negara. Dalam konteks Islam, kebijakan moneter tidak hanya fokus pada penawaran dan permintaan uang, tetapi juga menekankan prinsip keadilan dan persaudaraan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesetaraan dan memastikan distribusi kekayaan serta pendapatan yang adil. Pada masa Nabi Muhammad SAW, praktik moneter menggunakan standar bimetal (emas dan perak). Kebijakan moneter mengatur jumlah dan distribusi uang untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik dan eksternal. Kebijakan moneter konvensional memiliki kelemahan karena bergantung pada suku bunga dan riba, yang dilarang dalam Islam. Pengelolaan mata uang syariah berdasarkan prinsip bagi hasil telah memberikan dampak positif di beberapa negara, meskipun tidak selalu menjadi solusi jangka pendek. Kebijakan moneter syariah harus bebas dari suku bunga dan riba, menggunakan instrumen yang sesuai dengan hukum syariah.

Keywords: *Kebijakan Moneter, Perspektif, Islam*

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi adalah topik yang selalu menarik perhatian dan tidak pernah membosankan untuk dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan peradaban suatu negara dari waktu ke waktu sering kali

menyebabkan perubahan kinerja ekonomi negara tersebut, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi merupakan ancaman terbesar bagi negara mana pun karena dapat menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat, yakni kesenjangan antara si kaya dan si miskin (Aini, Ihda, 2019). Oleh karena itu, pemerintah terus mencari solusi agar kesenjangan ekonomi ini tidak muncul di tengah masyarakat dan negara.

Sektor moneter adalah jaringan yang sangat penting yang dapat mempengaruhi sektor riil dalam perekonomian. Kebijakan moneter berfungsi sebagai instrumen yang sangat penting bagi kebijakan publik, baik dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Untuk menjalankan fungsinya dengan baik, kebijakan moneter harus melakukan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh sistem perekonomian, terutama sistem keuangan (Cindy Novitasari dan Ray Dwiki Syahputra, 2021).

Uang adalah komoditas paling penting dalam konsep keuangan. Pandangan Islam tentang uang berbeda dengan pandangan konvensional. Dalam ekonomi konvensional, uang dianggap sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan dan disewakan untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, uang dipandang sebagai alat tukar untuk menghindari riba. Uang muncul dari keinginan pihak-pihak yang melakukan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan mereka secara bersamaan. Namun, semakin banyak kebutuhan akan pembatasan dalam pelaksanaan pertukaran, semakin sulit untuk memenuhi berbagai keperluan dari berbagai jenis. Akibatnya, orang-orang mengalami kesulitan dalam menemukan permintaan umum dan menetapkan nilai sebenarnya dari barang yang dipertukarkan (Sitti Nikmah Marzuk, dkk, 2021).

Kebijakan moneter adalah usaha untuk mengatur atau mengendalikan kondisi perekonomian suatu negara. Usaha ini bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui stabilisasi harga



dan pencegahan inflasi. Dengan kebijakan moneter, pemerintah juga dapat mengelola jumlah uang yang beredar di negara tersebut, termasuk mempertahankan, mengawasi, menambah, atau mengurangi jumlahnya (Nanang Sobarna, 2019)

Kebijakan moneter sangat erat kaitannya dengan jumlah uang yang beredar. Untuk menjaga kestabilan ekonomi suatu negara, sektor keuangan berperan penting. Jika jumlah uang yang beredar tidak mencukupi, negara tersebut akan mengalami deflasi. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan, inflasi akan terjadi. Untuk menjaga agar jumlah uang yang beredar tetap stabil, bank sentral harus mengawasi kestabilan tersebut. Indikator keberhasilan kebijakan ini mencakup perbaikan neraca pembayaran dan kestabilan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, tujuan kebijakan ini sama dengan ekonomi konvensional, yaitu menyeimbangkan dan menstabilkan mata uang, menjaga likuiditas, menciptakan instrumen keuangan yang beragam, transparansi, dan mekanisme pasar yang efektif. Dengan demikian, ekonomi suatu negara dapat tumbuh sesuai harapan.

B. Kajian Teoritis

Kebijakan moneter adalah salah satu cara yang digunakan oleh suatu negara untuk mengendalikan dan mengarahkan kondisi ekonomi makro agar lebih baik, dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesetimbangan dan mempertahankan stabilitas harga. Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat menambah, mengurangi, atau mempertahankan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan moneter berfungsi sebagai kunci untuk memperoleh strategi ekonomi makro yang efektif guna mengatasi inflasi.

Otoritas moneter memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat harga dan nilai tukar suatu negara. Mereka melakukan ini dengan mengontrol jumlah uang yang beredar, mempengaruhi suku bunga,

mengatur aliran kredit, dan memantau perkembangan sektor keuangan. Salah satu strategi yang digunakan adalah bank sentral menetapkan suku bunga untuk deposito bank dan menentukan persentase aset yang dapat dipinjamkan. Dalam beberapa kasus, kegiatan penegakan kebijakan bank sentral telah berkembang selama periode yang panjang.

Secara syariah, kebijakan moneter harus bebas dari riba dan bunga, karena riba yang termasuk dalam bunga bank sangat dilarang dalam Islam. Larangan ini menghilangkan peran bunga dalam ekonomi kapitalis, yang merupakan instrumen utama pengelolaan uang. Dalam Islam, pengelolaan uang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Jumlah uang yang beredar diatur dengan menambah atau mengurangi jumlahnya sesuai kebutuhan.

Berikut adalah beberapa artikel penelitian yang relevan untuk mendukung bahasan ini. Pertama, artikel berjudul "Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam" yang ditulis oleh Ahmad Fuad. Artikel ini menjelaskan bahwa sistem moneter dalam Islam memiliki ciri khas khusus dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional, terutama karena manajemen pengelolaannya tidak menggunakan bunga, yang menjadi perbedaan utama dari ekonomi konvensional (Ahmad Fuad, 2020).

Kedua, artikel berjudul "Kebijakan Moneter Syariah" yang ditulis oleh Luqmanul Hakiem Ajuna. Artikel ini menjelaskan bahwa keberhasilan ekonomi suatu negara tercermin dalam kebijakan moneternya. Kebijakan moneter ini dibentuk berdasarkan respons ekonomi mikro yang didorong oleh pembuat kebijakan moneter di tingkat makro. Selain itu, kebijakan moneter ini juga harus sesuai dengan syariat agar ekonomi tumbuh dengan berkah Allah (Luqmanul Hakiem Ajuna, 2017).

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian tinjauan literatur digunakan dalam penyusunan jurnal ini. Kajian tinjauan pustaka merupakan salah satu strategi pencarian, yang berarti bahwa kerangka kerja pustaka



yang sistematis memiliki pendekatan *top-down* (Sugiyono, 2010). Artinya, dokumen yang disintesis diidentifikasi melalui pencarian sistematis jurnal ilmiah atau database ilmiah yang relevan. Untuk banyak pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dapat menjadi alat metodologi terbaik untuk memberikan jawaban. Ini sangat berguna, misalnya, ketika seorang peneliti mengevaluasi teori atau bukti dalam bidang tertentu, atau memeriks validitas atau akurasi teori tertentu atau teori yang bersaing. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kejadian yang sebenarnya.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode ini menggunakan teknik penyajian hasil dalam bentuk naratif serta menegaskan pencarian makna, konsep, dan pengertian, atau mendeskripsikan suatu kejadian. Dalam pendekatan kualitatif ini, penulis menggunakan literatur yang relevan, termasuk buku-buku dan dokument-dokumen dari sumber publikasi. Penulis kemudian mengkaji dan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang terkumpul untuk mendeskripsikan masalah kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data mengikuti sumber-sumber publikasi tersebut. Deskriptif berarti hasil penelitian dideskripsikan sejelas mungkin berdasarkan data yang telah dikumpulkan tanpa menarik kesimpulan apapun dari penelitian tersebut.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem Moneter Menurut Perspektif Islam

Uang dan moneter memiliki hubungan yang sangat erat, Al-Ghazali mendefinisikan uang sebagai standar pengukuran (satuan) agar tidak terjadi kejadian penipuan dan kecurangan. Uang menjadi solusi dari berbagai permasalahan dari sistem barter. Dinar dan dirham merupakan kekayaan paling utama dari pada yang lainnya. Ia juga mempunyai pandangan bahwa uang adalah bebas nilai atau netral



Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa uang merupakan standar nilai dan alat tukar, bukan suatu komoditi yang diperdagangkan. Uang harus proporsional dalam transaksi dimana harga ditetapkan. Sedangkan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa uang merupakan standar pengukuran dan penyimpanan nilai, Menurutnya uang yang relatif stabil dan tidak mudah fluktuatif adalah uang emas dan perak.

Sistem moneter Islam adalah sekumpulan aturan dan pedoman yang digunakan untuk mengatur keuangan dalam suatu negara. Dalam setiap sistem keuangan tergantung pada satuan dasar keuangan yang digunakan apakah emas, perak, emas dan perak, atau fiat money. Ada tiga perbedaan yang dasar dalam sistem moneter Islam dan konvensional:

Sistem moneter konvensional menggunakan instrument bunga, sedangkan sistem moneter Islam menggunakan *profit and loss sharing* (PLS). Dalam PLS berlaku system win-win solution, semua pihak dijamin keadilannya, tidak ada pihak-pihak yang menanggung kerugian secara tidak adil. Antara pemilik modal dan pengusaha membagi keuntungan dan menanggung kerugian secara bersama-sama.

Pada sistem moneter konvensional terdapat cadangan fraksional bank. Dalam hal ini bank wajib menyimpan cadangan dalam persentase tertentu dari dana yang telah dihimpun. Oleh karena itu bank menciptakan jenis lain dari fiat money, berupa demand deposits dan uang elektronik. Sistem ini dapat memberikan keuntungan seigniorage yang tidak adil. Sedangkan pada sistem ekonomi Islam, dengan sistem seratus persen cadangan bank, maka tidak ada opportunity bagi bank untuk membuat uang baru, karena bank harus menyimpan semua dana cadangannya di bank sentral. Sedang untuk pembiayaan, bank hanya dapat menyulurkannya maksimum sesuai simpangan awal saja. Karenanya



itu bank tidak menciptakan daya beli baru yang tidak adil, dan terhindar dari riba.

Penggunaan uang fiat yang nilainya tidak sama dengan nilai nominalnya. Menerbitkan uang fiat berarti menciptakan daya beli baru dari sesuatu yang tidak ada dan dapat memberikan keuntungan yang tidak adil. Berbeda dengan uang emas dan perak yang berlaku dalam Islam, tidak terdapat berbedaan nilai pada intrinsik dan nominalnya.

Tabel 1
Perbedaan Sistem Moneter Konvensional dan Islam

Konvensional	Islam
Instrumen Suku Bunga	Konsep bagi Hasil
Fractional Reserve Banking System	100 Percent Reserve Banking System
Penggunaan Uang Flat	Full Bodied/Fully Backed Money

Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan Al-Qur'an dalam QS.Al-An'am:152 :

وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتَمِّ إِلَّا بِالْيَتِيمِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشْدَهُ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُلُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia)

dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangannya dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melaikannya menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepada kamu agar kamu ingat.”

Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip, moneter syariah berbeda dengan yang konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun *rate return* (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya.

Instrumen-Instrumen Kebijakan Moneter dalam Konvensional dan Perspektif Islam

Ada empat instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar:

1. Operasi pasar terbuka (*Open Market Operation*)

Pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah (*government security*). Bank sentral dapat membuat perubahan-perubahan ke atas jumlah penawaran uang dengan melakukan jual beli surat-surat berharga. Bentuk tindakan yang akan diambil tergantung kepada masalah ekonomi yang dihadapi. Pada waktu perekonomian mengalami masalah resesi, penawaran uang perlu ditambah. Bank sentral menambah penawaran uang dengan melakukan pembelian surat-surat berharga.



Penawaran uang akan bertambah karena apabila bank sentral melakukan pembayaran ke atas pembeliannya itu, maka cadangan yang ada pada bank perdagangan menjadi lebih besar. Dengan adanya kelebihan cadangan tersebut maka dapat memberikan pinjaman yang lebih banyak. Pinjaman ini akan diinvestasikan dan kegiatan ekonomi Negara akan menjadi bertambah tinggi.

Dalam masa inflasi, kegiatan ekonomi yang berlebih-lebih harus dikurangkan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangkan penawaran uang. Tujuan ini dapat dicapai oleh bank sentral dengan membeli surat-surat berharga. Dengan penjualan itu tabungan giral masyarakat dan cadangan yang dipesang oleh bank-bank perdagangan akan berkurang. Supaya operasi pasar terbuka dapat dilaksanakan dengan sukses dan memberikan efek yang diharapkan, dua keadaaan haruslah wujud dalam perekonomian.

2. Fasilitas diskonto (*Discount Rate*)

Tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang menjalin ke bank sentral. Dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi kegiatan bank-bank perdagangan, bank sentral harus memastikan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada system bank. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan berusaha agar bank-bank perdagangan selalu sanggup membayar semua cek yang dikeluarkan nasabah-nasabahnya. Yang pertama adalah dengan membuat pengarahan-pengarahan atau peraturan-peraturan tentang corak dan jenis investasi yang dapat dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Dan yang kedua adalah dengan memberi pinjaman kepada bank-bank yang menghadapi masalah dalam



cadangannya, yaitu cadangannya adalah kurang dari cadangan minimum yang ditetapkan oleh peraturan.

Peranan bank sentral sebagai suatu sumber pinjaman atau tempat untuk mendiskontokan surat-surat berharga tersebut dapat digunakan oleh bank sentral sebagai suatu alat untuk mengendalikan jumlah penawaran uang dan tingkat kegiatan ekonomi. Dalam keadaan di mana kegiatan ekonomi berada dibawah tingkat yang mewujudkan kesempatan kerja yang tinggi, bank sentral dapat mempertinggi kegiatan ekonomi dengan murunkan suku diskonto.

Dengan penurunan suku bunga diskonto, biaya yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan untuk meminjam dari bank sentral menjadi lebih murah. Ini akan mengalakkan mereka untuk memberikan lebih banyak pinjaman. Sebaliknya, apabila bank sentral ini mengurangi kegiatan ekonomi yang sudah mencapai tingkat yang terlalu tinggi, suku diskonto perlu dinaikkan. Kenaikan suku diskonto ini akan mendorong bank-bank perdagangan menaikkan suku bunga ke atas pinjaman-pinjaman yang diberikan. Oleh karenanya para pengusaha enggan membuat pinjaman baru dan pelanggan-pelanggan yang telah membuat pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang dibuat pada masa lalu. Pada akhirnya kegiatan ekonomi Negara akan menurun.

3. Rasio cadangan wajib (*Reserve Requirement Ratio*)

Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya. Keseksian kedua jenis kebijakan moneter yang baru dibicarakan di atas sangat tergantung kepada apakah kebanyakan bank perdangan mempunyai kelebihan cadangan atau tidak.



Jika apabila kelebihan cadangan terdapat dalam kebanyakan bank perdagangan, keduanya tindakan di atas tidak dapat digunakan untuk membuat perubahan-perubahan dalam penawaran uang.

Dengan adanya kelebihan cadangan, operasi pasar terbuka dan mengubah suku diskonto tidak mewujudkan efek yang diharapkan. Apabila kelebihan cadangan banyak terdapat di bank-bank perdagangan, di dalam mempengaruhi penawaran uang, langkah bank sentral yang paling efektif adalah dengan mengubah tingkat cadangan minimum.

Kelebihan cadangan yang terdapat dalam bank perdagangan akan dapat dihapuskan dengan menaikkan tingkat cadangan minimum tersebut. Contoh, misalkan cadangan minimum yang diwajibkan adalah dua puluh persen, tetapi bank-bank perdagangan pada umumnya mempunyai cadangan sebanyak dua puluh lima persen. Dalam keadaan seperti ini operasi pasar terbuka dan kebijakan mengubah tingkat bunga tidak akan memberi efek ke atas jumlah penawaran uang. Untuk mempengaruhi penawaran uang, perluan terlebih dahulu suku cadangan dinaikkan menjadi dua puluh lima persen.

4. Imbauan Moral (*Moral Persuasion*)

Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang beredar. Kebijakan ini dijalankan oleh bank sentral bukan dengan menetapkan dalam bentuk tertulis hal-hal yang harus dilakukan oleh bank-bank perdagangan, tetapi dengan mengadakan pertemuan-pertemuan langsung dengan bank-bank tersebut.

Dalam pertemuan ini bank sentral menjelaskan langkah-langkah yang sedang dijalankan oleh pemerintah dan bantuan-bantuan apa yang diinginkan oleh bank sentral dari bank-bank perdagangan untuk menyukkseskan tindakan tersebut. Dari pertemuan ini



bank-bank perdagangan akan mengetahui langkah-langkah bagaimana yang harus mereka lakukan agar usaha-usaha yang sedang dilakukan pemerintah akan mencapai tujuan dan efek yang diharapkan.

5. Prinsip – Prinsip Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam harus bebas dari unsur yang berbau dengan riba dan bunga bank. Dalam Islam riba yang termasuk didalamnya bunga bank yang sangat diharamkan secara tegas dalam Al-Quran. Dan manajemen moneter dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut:

Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah SWT

Manusia ialah pemimpin (khalifah) di bumi, namun mereka bukanlah pemegang sejati. Segala sesuatu yang diperoleh oleh manusia merupakan atas seizin Allah. Tidak boleh menumpuk kekayaan. Menghapus jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian. Menetapkan kewajiban yang sifatnya harus dan sukarela bagi semua manusia, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.

Mazhab Instrumen Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam

1. Mazhab pertama (*Iqtishaduna*)

Pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi, tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran uang melalui diskresioner. Tambahan pula, kredit tidak memiliki peran dalam penciptaan uang karena kredit hanya digunakan diantara para pedagang. Selain itu, peraturan pemerintah tentang surat peminjaman (*promissory notes*) dan instrument negosiasi



(*negotiable instruments*) dirancang sedemikin sehingga tidak memungkinkan penciptaan uang.

2. Mazhab Kedua (*Mainstream*)

Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Alquran melarang praktik penumpukan uang (*money hoarding*) karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrument kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialkasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan.

Permintaan dalam Islam dikelompokkan dalam dua motif yaitu motif transaksi (*transaction motive*) dan motif berjaga-jaga (*precautionary motive*). Semakin banyak uang yang menganggur (*idle*) berarti permintaan akan uang untuk berjaga-jaga semakin besar, sedangkan semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap uang yang menganggur berbanding terbalik dengan permintaan akan uang untuk berjaga-jaga. *Dues of idle fund* adalah instrument kebijakan yang dikenakan pada semua asset produktif yang menganggur.

E. Penutup

Praktik moneter pada masa Nabi Muhammad SAW menggunakan standar bimetal (emas dan perak). Kebijakan moneter mengatur jumlah dan penyebaran uang untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik dan eksternal. Namun, kebijakan moneter konvensional memiliki kelemahan seperti ketergantungan pada suku bunga dan riba, yang dilarang dalam Islam. Pengelolaan mata uang syariah, yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, telah menunjukkan dampak positif di beberapa negara, meskipun



tidak selalu menjadi solusi jangka pendek. Kebijakan moneter syariah harus bebas dari suku bunga dan riba, menggunakan instrumen yang sesuai dengan hukum syariah.

REFERENCES

- Ajuna, Luqmanul Hakiem, 'Kebijakan Moneter Syariah', *Al-Buhuts*, 13.1 (2017), 104–7.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Bunga Bank Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001).
- Amin, A. Riawan, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: UIN Press, 2009).
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alvabet, 2000).
- Fuad, Ahmad, 'Kebijakan Moneter Islam', *Jurnal Syariah*, 8.1 (2020), 1–24
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).
- Lewis, Mervin K. dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007).
- Marzuki, Sitti Nikmah, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Negeri Watampone, 'Konsep Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam', 1.2 (2021), 201–16
- Muhammad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).
- Novitasari, Cindy, and Ray Dwiki Syahputra, 'Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Al-Buhuts*, 13.1 (2021), 1–25.
- Perwataatmadja, Karnaen A. & Henri Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya* (Jakarta: Celestial Publishing, 2007).
- Perwataatmadja, Karnaen A., *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia* (Depok: Usaha Kami, 1996).



Pohan, Aulia, Potret Kebijakan Moneter Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 196.

Sobarna, Nanang, ‘Co-Management’, Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Ilmu Sosial, I.2 (2019), 175–82

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

